



Sabalong samalewa sebagai Etika Moral Orang Sumbawa¹

Yaspis Edgar N. Funay²

Abstraksi

Kajian ini mendeskripsikan kearifan lokal dalam bentuk etika atau prinsip moral masyarakat Sumbawa yang disebut *sabalong samalewa*. Etika tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat Sumbawa dalam menjaga eksistensi kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Prinsip tersebut menugaskan masyarakat untuk menghormati hubungan antara kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya, terutama karena adanya perubahan materi dan lingkungan yang mengakibatkan ketimpangan sosial sebagai akibat dari pembangunan lokal. Etika *sabalong samalewa* memberikan pedoman untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan materi atau fisik dan perkembangan mental atau spiritual, sebagai nilai-nilai bersama dan tindakan universal bagi masyarakat Sumbawa lintas kelas sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa etika *sabalong samalewa* bagi masyarakat Sumbawa adalah suatu embodiment atau pengejawantahan nilai dan perangkat keramahtamahan (*convivialisme*) dalam pencapaian kehidupan harmonis antara warga dan lingkungannya melalui perwujudan nilai-nilai lokal dan praktik penghormatan terhadap penghuni lain di muka bumi agar tak musnah.

Kata kunci: *etika moral lokal, embodiment (pengejawantahan), harmoni sosial dan lingkungan, orang Sumbawa, convivialisme.*

Abstract

The study describes local knowledge in the form of ethics or moral principle for the Sumbawan people known as *sabalong samalewa*. The ethic is perceived as a way of life for the Sumbawa people in maintaining the existence of human life and natural balance. The principle assigns the people to respect the relationship between human life and other life creatures, particularly due to material and environmental changes that have been resulting in social inequality as a consequence of local development. The ethics of *sabalong samalewa* provides a guidance for maintaining a balance between material or physical development and mental or spiritual development, as shared values and a universal act for the Sumbawa people across social classes. This study concludes that the ethics of *sabalong samalewa* for the Sumbawa people addresses an achievement for harmonious life between citizens and their environment through the embodiment of local values and practices of respecting other inhabitants on earth, or in other words to reconstruct convivialism in order to survive the existence of the Sumbawan people.

Keywords: *local knowledge, moral ethics, embodiment, social and environmental harmony, Sumbawan people, convivialism.*

A. Pendahuluan

Kajian ini mengeksplorasi etika moralitas khusus atau cara-pandang hidup yang spesifik yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai *tau samawa* di kalangan orang Sumbawa. Etika moralitas ini disebut sebagai *sabalong samalewa*. Etika ini menghargai

hubungan kehidupan manusia dengan ciptaan yang lainnya secara utuh ditengah situasi pembangunan yang tidak menentu. Etika moralitas ini adalah suatu cara-pandang hidup yang berarti membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik

¹ Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Funay, Yaspis Edgar N.. 2020. "Sabalong Samalewa sebagai Etika Moral Orang Sumbawa." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 7 (2): 103-123

² Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Email: sulthan_ipb@yahoo.com

material dengan pembangunan mental spiritual (dunia dan akhirat). Tujuan embodiment atau perwujudan (pengejawantahan) dari etika moralitas ini menjadi prinsip dasar bersama bagi harmonisasi kehidupan bermasyarakat di pulau Sumbawa. Lokasi penelitian di pulau atau "tana" Sumbawa menarik untuk dikaji karena etika moralitas ini berlaku bagi setiap anggota masyarakat tanpa mengenal perbedaan kelas sosial.

Dengan kata lain, mencakup seluruh kehidupan yang dewasa ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran ini nantinya diharapkan menuntun orang Sumbawa untuk memperlakukan sesama ciptaan secara baik berdasarkan pegangan hidup yang ada di masyarakat. Sementara itu, etika moralitas menurut pandangan Emmanuel Levinas (1982) adalah suatu cara pandang hidup yang merujuk pada pertemuan konkrit keamnesiaan yang berinteraksi dengan orang lain, jadi bukan semata-mata suatu kode moralitas atas seperangkat aturan-aturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Pengertian tentang etika moralitas semacam itu dirangkum pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) sebagai "ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk sehingga menjadi rujukan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat."

Pembahasan mengenai embodiment atas harmonisasi kehidupan berbasis tradisi lokal telah diteliti oleh banyak pengkaji. Menurut Peter Connolly

misalnya mengatakan bahwa, kebutuhan untuk mengembangkan studi teologi dan relasi antar masyarakat dengan metode antropologi menjadi sangat penting untuk membangun suatu cara-pandang berbasis akar rumput atau yang mengakar di dalam masyarakat (Connolly, 2001:229). Senada dengan itu, Philip L. Wicheri (2019) berpendapat bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa batasan budaya dan agama. Menurutnya, batasan-batasan tersebut berfungsi untuk menciptakan dan memelihara identitas masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menghubungkan manusia dengan Yang Mahakuasa. Disamping itu, Douglas J. Hall (2004) dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa pilihan terbaik dalam relasi manusia dengan ciptaan lain adalah konsep manusia hidup bersama alam.

Penegasan ini menunjukkan bahwa konsep itu meliputi seluruh tanggung-jawab manusia untuk menjaga dan menghormati alam (Wickeri, 2009:9-12). Di Indonesia penelitian tentang embodiment etika lokal untuk harmonisasi kehidupan berbasis tradisi lokal telah dilakukan oleh Abdul Halim (2014) yang mengatakan bahwa konteks Indonesia yang multikultural merupakan keniscayaan sekaligus menjadi modal kemajuan bangsa. Pembangunan daerah yang berdasarkan pada suatu pendekatan dan mengabaikan keragaman kultural akan berdampak pada menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi sehingga berdampak pada gejolak sosial yang berbahaya (Halim, 2014: 25). Lebih jauh lagi, menurut Tony Rudyansjah (2012) dalam tulisannya mengatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah perubahan guna melangkah ke ketinggian yang lebih

baik, seseorang harus mampu berbaur dan menjadi bagian dari kelompok dan kebudayaan masyarakat terkait. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa pola hidup atau kebudayaan sekelompok manusia akan memengaruhi pemikiran dan tindakan mereka (Rudyansjah, 2012: 6). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan celah karena belum melihat bagaimana suatu etika moral yang bersifat lokal dapat diwujudkan sebagai suatu kekuatan yang eksis dalam suatu komunitas masyarakat.

Menurut pemaparan publik dalam situs internet milik pemerintah kabupaten Sumbawa (2012), *sabalong samalewa* berarti, “membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik material dengan pembangunan mental spiritual (dunia dan akhirat).” Situs itu juga menjabarkan bahwa *sabalong samalewa* merupakan suatu semangat untuk saling berkerjasama, gotong-royong, dan tolong-menolong untuk semua orang yang mendiami dan memiliki cita-cita membangun pulau Sumbawa (*tau samawa*). Dalam perkembangannya kemudian prinsip di dalam etika moralitas ini mengandung tiga butir slogan-slogan kecil atau yang biasa disingkat dengan istilah 3ST. Makna 3ST sendiri memiliki arti saling tulung (saling tolong), saling tulang (saling lihat), dan saling totang atau saling mengingatkan (Fisabilillah, 2017:70). Oleh karena itu, orang Sumbawa (*tau samawa*) kemudian dapat diartikan sebagai orang yang dengan suka rela tinggal, hidup, dan bersumpah lahir batin membangun Tau dan Tana samawa itu sendiri (Zulkarnain, 2011:12). Berdasarkan prinsip-prinsip etika moralitas *sabalong samalewa* itulah kemudian bisa juga dijadikan sebagai

suatu embodiment atau pengejawantahan budaya lokal yang melingkupi cara-pandang hidup orang Sumbawa (Hidya Tjaya, 2012).

B. Metode dan Kerangka Teoritis

Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis pada interpretasi atas studi literatur, khususnya sebagai upaya untuk menjabarkan konteks mengenai embodiment atau perwujudan atas etika moralitas *sabalong samalewa*. Tesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah menjabarkan budaya asli orang Sumbawa yang dapat menjadi kekuatan di dalam jejaring budaya masyarakat setempat (societal culture) untuk mengatasi dampak negatif dalam pembangunan material dan efek globalisasi yang membuat masyarakat setempat gelisah atas masa depan mereka.

Upaya untuk menelusuri etika moralitas orang Sumbawa dilakukan dengan merujuk pada kerangka teoritis yang diajukan oleh M. D. Jackson (2016) yang mengatakan bahwa filsafat tradisional dapat menggunakan klaim universal untuk merujuk pada konteks kemanusiaan saat ini, hal ini dikarenakan kecenderungan filsafat moderen yang mengabaikan konteks kemanusiaan yang bersifat lokal. Menurutnya, upaya tersebut lebih ditujukan untuk mendorong para filsuf dan antropolog untuk memiliki kecenderungan pola pikir yang lebih bersifat empiris terhadap semua perbedaan yang ada khususnya menyangkut ruang lingkup kehidupan yang kompleks (Jackson, 2016:2-25).

Perlu diketahui bahwa selain perspektif universal atau global, masyarakat juga memiliki ruang perspektif lokal. Filsafat seharusnya melihat keragaman manusia (masing-masing wilayah) yang memiliki kekhasan etnis dan relativitas moral sehingga dapat menjadi filsafat yang konseptual (ibid). Hal inilah yang kemudian dapat membantu anggota masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam rangka memahami pesan budaya dari daerah masing-masing. Kemudian dalam prosesnya berkembang menjadi alat keramatamahan (*tools for covinviability*) (ibid: 135).

Secara harafiah, falsafah lokal dapat diartikan sebagai sebuah ajaran atau cara manusia bersikap yang lahir dari konteks kehidupan dimana pribadi itu hidup. Falsafah ini nantinya tidak hanya digunakan sebagai petunjuk mana yang benar atau salah, tetapi juga menyangkut motif-motif di dalamnya. Hal ini kemudian dapat diartikan lebih lanjut dengan dimensi etika dalam falsafah lokal. Menurut Malcolm Brownlee sesuatu hal akan masuk dalam ranah etika moral jika menyangkut pemikiran yang sistematis atas sebuah tindakan serta motivasi dan keadaan batin yang mendasarinya (Brownlee, 2016:16). Senada dengan itu, Franz Magnis-Suseno (1987) mengatakan bahwa etika erat hubungannya dengan tingkah laku seseorang juga bagaimana seharusnya kelakuan orang-orang itu. Etika juga menyelidiki perbuatan dan memberi bimbingan supaya seseorang dapat memperbaiki perbuatannya (Suseno, 1987:71). Sedikit mundur ke belakang, menurut Descartes (sebagaimana dikutip dalam Mustansyir, 2007: 53), untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan

permasalahan filsafat dibutuhkan pengaturan sedemikian rupa dengan bertitik tolak dari objek yang sederhana sampai objek yang lebih kompleks. Atau dari pengertian yang sederhana dan mutlak sampai pada pengertian yang kompleks dan nisbi (ibid). Lebih jauh lagi, perlu diketahui bahwa selain perspektif universal dan global, masyarakat juga memiliki ruang atau dimensi pemikiran lokal yang tidak bisa diabaikan dalam proses mengidentifikasi atau mengklarifikasi keadaan dan model tindakan (Jackson, 2016:3-33).

Dengan gambaran konsep inilah nantinya para sosiolog dapat menjelaskan berbagai gejala yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Dengan konsep ini pula nantinya teori sosial, etika, dan gap identitas dapat ditafsir-ulang sesuai dengan perubahan konteks yang dihadapi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, mengawali konsep berfikir ini saya mencoba memetakan tesis tentang *sabalong samalewa* dalam beberapa tahapan penggambaran (sketsa) sebagaimana yang dianjurkan oleh Michael D.Jackson (2016).

Pertama, membuat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup penalaran analogis konvensional dan moderen. Termasuk di dalamnya membedakan antara filsafat yang tidak sesuai dan akal sehat yang diproduksi oleh pengalaman kehidupan (ibid: 32-33). Menurut Jackson, gaya pemikiran yang harus ditinggalkan saat ini adalah metode generalisasi yang berlaku untuk semua konteks permasalahan. Ia menambahkan bahwa setiap daerah memiliki dimensi

sosial, budaya, dan adat yang berbeda. Jadi sudah seharusnya di eksplorasi agar ada kesinambungan yang jelas antara kenyataan dan taraf pemikiran (ibid:51-52). Hal ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mempertimbangkan bahkan menghindari perspektif filosofis yang tidak sesuai dengan konteks permasalahan. Lebih dalam daripada itu, dengan berpegang pada relativisme logis seseorang diharapkan dapat membedakan dengan jelas antara keyakinan yang dipegang dan tindakan nyata manusia, agar batasan-batasan ruang lingkup analogis penalaran menjadi jelas (ibid: 29).

Kedua, mengeksplorasi masalah hubungan yang tidak adil antara kenyataan dan pikiran dalam kaitannya dengan mengidentifikasi keanekaragaman manusia, kekhasan budaya, dan relativisme moral yang terkadang tampak tidak bersesuaian (ibid: 51). Dengan menyadari bahwa kehidupan setiap komunitas merupakan suatu sistem negosiasi etis dan sosial, jadi sudah seharusnya setiap peneliti menyadari adanya sebuah perbedaan konteks budaya di masing-masing lokasi yang spesifik (bahkan antar pusat dan pinggiran sebuah negara). Oleh karena itu, diperlukan sebuah ilustrasi realitas empiris yang lebih rasional sebagai suatu pendekatan pola pikir (ibid: 140-141). Disamping itu juga, Jackson (2016) berpendapat bahwa sudah seharusnya penelitian moderen lebih berfokus pada kondisi eksis dimana pemikiran dialami sebagai suatu proses yang sadar dan sengaja. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan suatu keunikan atau kekhasan yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu saja (ibid: 153-155).

Ketiga, mengangkat cara-pandang hidup masyarakat lokal sebagai suatu teori ritual eksistensial yang mengatur moral dan tindakan manusia berbasis mitos dan ritus adat (ibid: 100-105). Dalam terminologi inilah ide tentang menemukan suatu aturan atau perangkat yang dapat menjembatani hubungan antara diri sendiri (self) dan orang lain (others) dirumuskan. Kelisanan sendiri kemudian termasuk dalam komponen tersebut karena dapat membantu masyarakat lokal untuk berkomunikasi dengan orang lain dan untuk memahami pesan budaya melalui ritual, simbol, dan narasi lisan lainnya yang terdapat dalam masyarakat tersebut (ibid: 135).

Keempat, memperbaiki dan menghidupkan kembali paradigma berfikir yang mengambil konsep dasar melalui pengalaman hidup lokal atau kondisi eksistensial sebagai suatu proses yang dialami dengan sadar dan disengaja. Pemikiran semacam ini kemudian menjadi landasan logis suatu struktur filsafat rasional moderen yang menghidarkan diri dari ketidaksesuaian suatu teori atas pengalaman hidup (ibid: 181).

Menurut Jackson (2016), sudah seharusnya para ahli memiliki pemisahan yang jelas antara suatu keintiman dan sekaligus keterasingan, orang yang ikut berpartisipasi dan yang hanya menjadi pengamat. Hal ini dimaksudkan agar filsafat tidak hanya menjadi suatu perilaku adaptif yang diciptakan dan dirancang oleh manusia untuk menghadapi dunia yang luas (ibid: 181-182). Garis besar pemetaan inilah yang dalam prosesnya akan berkembang menjadi alat atau

perangkat keramahtamahan yang alamiah (*tools for coviniality*).

C. Deskripsi Kajian: Sejarah Pulau Sumbawa dan Konteks Budaya Lokal

Realitas saat ini menunjukkan kecenderungan faktual perjumpaan yang tidak otentik lagi. Orang sering melihat dan memperlakukan “yang lain” berdasarkan gagasan atau abstraksi yang dimiliki oleh diri sendiri. Jika memang demikian berarti sebetulnya dalam hal ini orang tersebut sama sekali belum bertemu dengan konsep “yang lain”. Atau bisa dikatakan bahwa fenomena yang dihadapi hanyalah suatu gagasan dan abstrak belaka mengenai orang lain. Oleh karena itu, sebelum berbicara jauh mengenai suatu konsep keramahtamahan, akan lebih baik jika mengingatkannya dalam sebuah bingkai tindakan sosial yang dilakukan secara sadar dan dinyatakan terhadap orang lain. Menurut Weber, sebagaimana yang dibahas oleh Talcott Parson (1947: 117) hal semacam itu mencakup pertimbangan rasional atas perangkat (tindakan) alternatif untuk mencapai sebuah tujuan dengan hasil yang relatif atau tidak menentu. Dalam kategori tersebut, Weber (1978) mengidentifikasi empat tipe tindakan sosial, yaitu: tindakan rasional instrumental, tindakan yang berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.

Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang memiliki makna terhadap diri sendiri, tetapi juga berdampak pada sekelilingnya dan sewaktu-waktu

bisa memberikan efek timbal-balik sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau berkaitan dengan kenyataan sosial yang dihadapi (Paul Johnson, 2013: 11). Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan sosial, setiap individu akan dihadapkan dengan suatu pertimbangan sosial. Keadaan ini bisa jadi merupakan suatu suasana pikiran yang sangat rumit sehingga memerlukan suatu perangkat atau tools dalam setiap perhitungannya. Selain itu, faktor eksternal berupa moral dalam masyarakat menjadi faktor pendukung yang sangat penting untuk seseorang agar dapat melakukan suatu tindakan sosial. Pertimbangan rasional yang dimaksud adalah keadaan memilih pilihan oleh seorang manusia secara personal yang memiliki segala bentuk perhitungan moral dan kemudian diteruskan dengan kesanggupan untuk menentukan keputusan dari pertimbangan tersebut (Berthens, 2013:11). Setelah melalui fase pikiran yang rumit itulah baru seseorang (personal) dapat melahirkan suatu tindakan atau aksi sosial yang diperkirakan mampu memberi dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nantinya diantara jawaban-jawaban yang keluar dari suatu pertimbangan rasional memiliki ciri khas yang mencerminkan rasio seseorang yang tidak ditemukan pada makhluk lain dibawah manusia (ibid: 11-12).

Melalui gambaran rinci mengenai tindakan sosial dalam perspektif Weberian, menurut M. D. Jackson (2016) konsep keramatamahan bisa dijelaskan secara sistematis sebagai suatu perangkat atau tindakan yang menuntun kehidupan manusia dalam bentuk moralitas dan akal sehat berbasis pada mitos dan ritus lokal. Dengan kata lain, konsep itu

menjabarkan hubungan antar manusia termasuk di dalamnya terdapat relasi dengan sesama makhluk hidup lain yang berhubungan dengan suatu pola kehidupan yang saling berdampingan dan berbagai tindakan didalamnya (Jackson, 2016: 137-145). Hal itu meliputi juga cara-cara manusia menggambarkan perjumpaan wajah orang lain dengan ilustrasi realitas empiris yang lebih rasional (ibid). Pengertian ini lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap manusia itu unik dengan segala apa yang telah ia dapatkan melalui modal sosial di dalam masyarakat di masing-masing tempat. Oleh karena itu, ukuran keramatamannya akan berbeda sesuai dengan moralitas yang terbentuk dalam sebuah masyarakat (ibid: 29-30). Hal ini kemudian didukung dengan berbagai pertimbangan sosial yang secara berbeda dinilai berdasarkan filosofi budaya dan konteks etnografi yang beragam meskipun berada di dalam suatu lokasi yang sama atau dalam lingkup budaya yang lebih luas (ibid: 51-52). Sebelum diterapkan, perangkat keramatamahan jelas sudah diuji dengan berbagai macam kecocokan keadaan sosial masyarakat, budaya yang dianut dalam suatu kelompok, dan adat yang dipertahankan secara turun-temurun oleh para pendahulu mereka (ibid: 102).

Setelah melalui proses pengujian, hasil dari perangkat keramatamahan nantinya diharapkan mampu menghasilkan suatu hubungan yang bersifat mutual antar manusia bahkan makhluk hidup yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi semacam ini akan memicu suatu kemajuan bagi kualitas relasi dan kerjasama bahkan antara orang-orang yang tidak saling mengenal dalam jumlah yang

lebih besar (banyak) (Hatari, 2018: 44-47). Tawaran rekonstruksi sosial semacam ini diharapkan mampu menangkai konflik-konflik di masa depan yang acapkali dilandasi oleh alasan perbedaan identitas budaya (Huntington, 1993: 22). Hal tersebut diajukan terutama jika setiap manusia menyakini bahwa kebudayaan dapat digunakan secara politis untuk memobilisasi konflik-konflik yang mengatasnamakan perbedaan identitas budaya (Kung, 1997: 163).

Deskripsi diatas menjadi penting karena sebelum sekelompok manusia berjumpa dengan dunia diluar kelompok tersebut, mereka sudah pasti sangat berpeluang untuk saling bertikai. Alasan-alasan seperti berebut kekuasaan, makanan, bahkan perbedaan status sosial dalam kelompok dapat menjadi sebuah konflik internal yang potensial untuk berujung ricuh. Dampak seperti inilah yang akan didapatkan suatu kelompok sosial jika tidak dengan tegas merumuskan perangkat keramatamahan yang berpatokan pada rasio dan moralitas lokal masyarakat itu sendiri. Gaya atau logika perumusan alat keramatamahan sebagaimana yang diajukan oleh M. D. Jackson (2016) merekomendasikan prosedur atau mekanisme yang memiliki karakteristik atau ciri khas dari suatu kelompok sosial masyarakat agar tidak tergerus zaman atau hilang ditelan lompatan budaya modernisme yang kemungkinan besar berdampak pada keterasingan bagi penduduk lokal (ibid: 100-101). Terdapat setidaknya beberapa riwayat atau konteks menyejarah yang penting untuk digaribawahi berkaitan dengan perkembangan situasi sosial di Pulau atau tana Sumbawa. Pertama, tercatat bahwa kerajaan Hindu-Jawa mengambil andil

sangat besar dalam perkembangan budaya di tana Sumbawa. Menurut catatan sejarah kerajaan Hindu-Jawa masuk dan berkembang di Sumbawa sejak abad ke-14. Pada prinsipnya pengaruh kerajaan tersebut masih tetap membekas hingga saat ini, terutama di bagian barat Pulau Sumbawa (Noordyn, 2007: vi). Kedua, pada tahun 1350 Majapahit melakukan infansi ke seluruh wilayah kerajaan Hindu Jawa termasuk di dalamnya Sumatera, Malaka, Kalimantan, Sumbawa, Seram, dan Papua (ibid: vi-vii). Ketiga, Islamisasi di tana Sumbawa terjadi sekitar tahun 1620 dibawah pengaruh kerajaan Makassar dan kerajaan Goa. Hal ini kemudian membuat gaya politik dan kebudayaan Sumbawa hampir mirip dengan keadaan di Sulawesi Selatan karena adanya hubungan yang erat antara keduanya. Menurut catatan Speelman, seorang jenderal VOC yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, pulau Sumbawa telah berada dibawah kekuasaan Makassar selama kurang lebih 47 tahun dimana Sumbawa harus membayar upeti ke Kerajaan Goa (ibid: vii-viii). Terakhir, pulau Sumbawa bergabung ke dalam wilayah administrasi karesidenan Timor yang beribu-kota di Kupang pada tahun 1909. Pada saat itu terdapat beberapa kerajaan yang berelasi dengan baik di pulau Sumbawa, diantaranya adalah: kerajaan Bima, Dompu, Sanggar, Tampora, Papekat, dan Sumbawa (ibid: xxxii-xxxiii). Menarik untuk dilihat bahwa dalam rentetan peristiwa penting di atas, pulau Sumbawa mengalami berbagai macam pertemuan, interaksi dan percampuran budaya yang cukup beragam. Dimulai dengan pertemuan dengan budaya Hindu yang bertransmigrasi ke pulau Sumbawa. Sementara itu, di sisi lain. etnis Bali di pulau Sumbawa

kemudian berhasil unggul dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan penting dalam birokrasi pada rentan tahun 1970-1980. Lambat laun keberadaan etnis Bali membawa warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat pulau Sumbawa. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan aksitektur dan aktivitas adat budaya Bali yang mencolok terutama di pulau Sumbawa bagian Barat. (Iskandar, 2009: 57).

Dari rentetan peristiwa penting yang telah diuraikan diatas, beberapa ahli yang telah meneliti juga membagi keadaan sosio-historis Sumbawa menjadi beberapa pemisahan yang jelas terkait waktu atau peristiwa kejadian. Untuk mendapatkan data historis tersebut, saya mengambil data dari literatur (buku) yang bisa dijadikan refrensi karena telah mengumpulkan informasi dari hasil wawancara menyeluruh terhadap semua elemen masyarakat dan seluruh fenomena yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, saya melakukan ketegorisasi terhadap buku Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat yang disusun oleh Bambang Suwondo dkk (1978) dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat, sebagaimana berikut ini.

(1) Periode zaman kuno (Abad 1-15 M)

Kehidupan masyarakat saat itu sangat erat dengan kehidupan bergotong-royong dalam hal membangun rumah, mengerjakan sawah, dan lain-lain. Mata pencaharian utama masyarakat pada umumnya di pulau Sumbawa adalah berburu, menangkap ikan, dan berladang. Karakteristik agrikultur semacam ini pula yang berdampak pada

pola pengelolaan tanah sebagai milik bersama yang dikerjakan secara gotong-royong. Seperti kebanyakan masyarakat etnis berbagai daerah di Indonesia, suku Sumbawa pada mulanya percaya pada mitologi tentang hal hebat dan kekuatan spiritual yang melebihi kemampuan mereka. Oleh karena itu, kepercayaan mereka dapat digolongkan ke dalam kepercayaan pada roh atau animisme sekaligus kepercayaan akan kekuatan gaib atau dinamisme. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan menhir atau semacam batu prasasti di daerah tersebut yang berfungsi sebagai medium pemujaan atau tempat ziarah keramat (shrine) untuk mengenang roh leluhur dan penghormatan kepada nenek moyang yang tidak kelihatan. Hal ini dilakukan agar relasi ingatan antara mereka dan para pendahulu tidak terputus (Suwondo dkk, 1978: 13).

Perkembangan dalam periode ini kemudian ditandai dengan masuknya agama Hindu dan Islam. Diawali dengan masuknya budaya Hindu yang tidak jauh berbeda dalam praktik penyembahan dan perbadahannya. Menghormati roh nenek moyang dan kekuatan alam merupakan hal yang sudah biasa terjadi di pulau Sumbawa saat itu, kedatangan budaya Hindu tinggal mengubah cara pelaksanaan, peraturan-peraturan adat, dan pola kehidupan sehari-hari saja. Perkembangan budaya Hindu yang tidak asing bagi masyarakat awal pulau Sumbawa membuat banyak kalangan bangsawan dan raja saat itu ikut mengambil bagian di dalamnya. Sehingga banyak pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuka adat menganut, menerima dan menjalannya. Bangunan-bangunan agama di daerah ini terdapat hampir di semua

kabupaten Nusa Tenggara Barat terutama bangunan-bangunan Hindu. Sayang pada saat ini tinggal bekas-bekasnya saja karena sejak awal perkembangan Islam semua peninggalan-peninggalan Hindu di runtuhkan.

Hal ini pula yang menandai perkembangan agama Islam di pulau Sumbawa (ibid: 37). Disamping itu, keadaan sosial masyarakat Sumbawa saat itu sudah tergolong sangat maju dalam hal pola penerimaannya. Dengan adanya para pendatang yang mulai menetap tersebut maka terjadilah pergaulan antara orang pendatang dan masyarakat setempat. Pergaulan tersebut menimbulkan rasa saling hormat-menghormati antara satu dan yang lainnya. Antara kedua-duanya secara tidak sadar maupun sadar terjadilah pengaruh-memengaruhi dalam bidang budaya. Satu kebiasaan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya bahwa kebudayaan asing itu tidak diterima begitu saja, tetapi mana yang cocok diambil, sedangkan yang tidak cocok ditinggalkan. Demikian halnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat termasuk di Sumbawa. Pengaruh budaya dari luar yang dirasakan sangat meresap sampai saat ini adalah pengaruh kebudayaan Hindu maupun Islam sehingga dapat terlihat pada susunan masyarakat di pulau Sumbawa terdapat golongan-golongan yakni raja-raja beserta keluarganya, orang-orang terkemuka, rakyat biasa, dan orang yang tidak merdeka (ibid: 39-40).

(2) Periode Zaman Baru (Abad 15 - 17 M)

Periode kedua ini merupakan masa yang panjang karena banyak masalah, peperangan, dan perubahan kepemimpinan di masyarakat. Tetapi jika berfokus kepada bidang sosio-historis, hal-hal yang

perlu dicatat adalah menjelang akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 agama Islam masuk di pulau Sumbawa dari arah Barat (Jawa). Menurut babad Lombok, setelah Sunan Prapen menyebarkan agama Islam secara merata di pulau Lombok, ia meneruskan perjalanan ke pulau Sumbawa dalam tugas yang sama. Sejak itu, kerajaan-kerajaan kecil yang menganut agama Siwa-Buddha menjadi penganut agama Islam. Penyebaran agama Islam di Sumbawa di Pulau Sumbawa berjalan dengan lancar, bahkan menurut cerita rakyat Sunan Prapen juga mengantarkan agama Islam sampai ke Kerajaan Dompu di Sumbawa Tengah dan Bima di Sumbawa Timur (ibid: 50).

Kedatangan orang-orang Jawa di pulau Lombok dan Sumbawa sejak abad 14 bersamaan dengan masuknya pengaruh kerajaan Majapahit telah mengubah cara hidup penduduk dari berladang liar menjadi bersawah dan tinggal menetap. Kekayaan hasil bumi dan ternaknya pada awal abad ke 16 telah menarik pedagang-pedagang dari seluruh Nusantara untuk dating di pelabuhan-pelabuhan di pulau Lombok dan Sumbawa seperti garam, kain-kain halus, alat-alat rumah tangga yang mereka tukar dengan padi di Lombok, hewan dan kayu sapang di Pulau Sumbawa. Selain itu juga, dimasukkan ke Lombok dan Sumbawa, gambir dari Singapura dan Riau, gula dari Jawa, gula aren dan lain-lain dari Sulawesi Selatan (ibid: 66).

Perkembangan agama Islam di Sumbawa bahkan lebih awal daripada di pulau Lombok. Menurut catatan Zolinger (1855) dan van Padang (1951), agama Islam masuk antara tahun 1450-1540.

Meski demikian, menurut Suwondo dkk (1978) tidak ditemui catatan dari kalangan santri yang dapat memperkuat keterangan itu. Mungkin sekali agama Islam yang pertama-tama dibawa ke pulau Sumbawa oleh pedagang-pedagang Islam dari pulau Jawa dan Palembang. Kemudian pada awal abad ke 16 Sunan Prapen datang pula ke pulau Sumbawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun perkembangannya belum merata dan mendalam, bahkan cenderung lambat.

Pada abad ke 17 perkembangan agama Islam di pulau Sumbawa sudah merata setelah para mubaligh dari Sulawesi Selatan beroperasi di daerah ini (Suwondo dkk, 1978: 75). Antara tahun 1500-1800 keadaan pendidikan di pulau Lombok dan Sumbawa masih sangat tradisional. Anak-anak menerima pengetahuan dan keterampilan langsung dari orang tuanya, kemudian dikembangkannya dengan mencontoh dan melalui penemuannya sendiri. Setelah agama Islam masuk di Lombok dan Sumbawa anak-anak belajar pada guru ngaji mereka secara berkelompok di rumah, surau atau masjid yang perkembangannya mirip seperti kehidupan pondok pesantren di pulau Jawa (ibid: 67). Sampai pada akhir abad ke 18 mereka masih percaya kepada takhayul yang sangat menghambat sebuah kemajuan. Mereka segan kepada perubahan dan masih percaya adanya bermacam-macam makhluk supernatural (ibid: 76).

(3) Periode Abad Ke-19 dan Masa-Masa Sesudahnya (1800- 1975an)

Menurut Sjamsuddin (2013) dari penelusuran catatan Zollinger (1855) tentang letusan Gunung

Tambora, pada periode ini pulau Sumbawa juga mengalami banyak peristiwa dalam sketsa perkembangannya. Dimulai dengan peperangan dan pemberontakan internal, pasang surut hubungan antara kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa, hubungan luar yang terbilang rumit, baik dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), Inggris, maupun Jepang, hingga rentetan peristiwa meletusnya gunung Tambora dibagian utara pulau Sumbawa yang menenyapkan 4 kerajaan sekaligus.

Dimulainya periode ini ditandai dengan masa kepemimpinan Sultan Muhammad Kaharuddin II (1797-1842). Ia terkenal perkasa dan terkenal dengan julukan Datu Bau Balo. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengukuhkan pengakuan bekas-bekas kerajaan yang dulu ditaklukkan secara paksa untuk membentuk kesultanan Sumbawa. Berikutnya Sultan Muhammad Kaharuddin II digantikan oleh Sultan Amirullah. Pada zaman pemerintahan Sultan ini, kerajaan membeli kapal layar tipe skunar bernama Mastora untuk mengadakan hubungan keluar hingga ke Singapura yang memberikan perubahan dan perbaikan bagi kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya bibit sapi dan kopi dimasukkan ke pulau Sumbawa. Tetapi kelemahannya, ia kurang memperhatikan hubungan dengan daerah taklukan yang menyebabkan sebagian besar daerah yang menganggap diri tidak terikat kepada Sultan Sumbawa, seperti Plampang, Alas, Sateluk, Taliwang, Lopok, dan Jereweh, mulai membangkang bahkan berontak melawan Sultan Sejak. Masa ini pula pulau Sumbawa menjadi salah satu incaran utama Inggris dan Belanda karena melihat perdagangan yang sudah

mulai ramai diminati. Barang-barang hasil pertanian dan peternakan menjadi bahan ekspor yang utama (Suwondo dkk, 1978: 120). Perlu diketahui bahwa keadaan penduduk di pulau Sumbawa sudah lebih maju daripada periode sebelumnya, bahkan sebelum kekuasaan Belanda menguat karena mereka sudah banyak berkontak dengan dunia luar. Terutama dalam hubungan perdagangan. Pedagang-pedagang dari Bima yang kebanyakan keturunan Sulawesi, berlayar jauh ke Sulawesi, Jawa, Kalimantan, bahkan ke Sumatera membawa hasil bumi dan kembali membawa barang-barang dagangan hasil industri modern. Sebaliknya dari daerah lain terutama Sulawesi datang merantau dan menetap di pulau Sumbawa. Semuanya itu membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan masyarakat di pulau Sumbawa. Lebih-lebih masyarakat disana lebih terbuka dan cepat menerima pengaruh yang baik, kecuali ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama yang tidak mengenai damai (ibid: 171).

Pada periode ini juga kebangkitan sektor keagamaan patut untuk diperhatikan karena tidak hanya dimonopoli oleh agama Islam saja, tetapi agama Hindu pun mulai bergerak mengoreksi segala kekurangannya di masa lampau. Urusan agama Hindu yang sejak tahun 1905 dipegang oleh Patih kemudian oleh Punggawa, pada tahun 1946 tugas itu dicabut dan diambil oleh suatu organisasi Krama Pura Pusat yang diketuai oleh A. A. Made Barahyangwangsa dengan enam orang anggotanya. Sejak saat itu, mempelajari dan mendalami agama tidak lagi monopoli bagi kaum Brahmana yang mendorong agama Hindu maju setingkat. Di tiap-tiap Banjar muncul kelompok-

kelompok diskusi dan kelompok pembaca lontar-lontar agama Hindu yang dijadikan pokok pembahasan. Dari golongan Kristen pun menggiatkan usaha zending atau penginjilan. Melalui lembaga pendidikan yang didirikan di kota Cakranegara khususnya untuk menarik simpati orang Cina dan Hindu yang sebagian akhirnya memeluk agama Kristen dengan sukarela. Di kota Mataram dibangun berbagai jenis gereja, yang mencerminkan keadaan plural sudah mulai terbentuk (ibid: 219).

D. Pembahasan: *Sabalong samalewa* sebagai Etika Lokal di Pulau Sumbawa

Provinsi NTB yang terdiri dari pulau Lombok dan Sumbawa cukup unik karena penduduknya mayoritas Muslim, diapit oleh dua provinsi, yaitu Bali yang mayoritas Hindu dan NTT yang mayoritas Kristen. Mungkin bukan semata suatu kebetulan ketika ketiga provinsi yang semula bernama Sunda Kecil itu (di zaman Belanda disebut *Kleine Soenda Eilanden*) dibagi menurut agama yang mayoritas dipeluk masing-masing provinsi. Perjalanan sejarah kedua pulau ini juga menarik. Masing-masing ketika masih berada dalam fase “tradisi kecil”, mereka telah berhubungan dan berinteraksi dengan “tradisi-tradisi besar”. Dikatakan tradisi kecil karena dalam konteks satu pulau Sumbawa memiliki beberapa macam komunitas masyarakat didalamnya. Keadaan konkrit tersebut kemudian berkembang dengan adanya interaksi dengan pulau dan kebudayaan lain yang datang ke Sumbawa. Tahap inilah yang kemudian diberi istilah interaksi dengan tradisi-tradisi besar.

Independensi yang berlanjut di antara kedua tradisi itu menimbulkan masing-masing budaya berakulturasi, berasimilasi, bahkan mengalami proses sinkretik (Sjamsuddin, 2013: 168).

Selanjutnya secara politis Jawa memperkenalkan sistem kerajaan yang lebih konkrit serta sistematis pada tahun 1300an dan Makassar mengintroduksi gelar serta pangkat-pangkat hadat di pulau Sumbawa dalam rentan waktu 1500an (Suwondo dkk, 1978: 32). Semua ini menunjukkan bahwa dalam proses sejarah yang berlangsung berabad-abad, pulau Sumbawa secara sosio-politis, sosio-kultural, dan sosio-ekonomis, senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan dunia di luar batas-batas teritorinya. Hal ini penting sehubungan dengan keterlibatan Sumbawa untuk menerima pengaruh-pengaruh dari luar, disamping dinamika masyarakat Sumbawa sendiri untuk menyaring pengaruh-pengaruh itu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang berlaku setempat pada waktu itu (Sjamsuddin, 2013: 69).

Dengan gambaran keadaan seperti itu, pemikiran mengenai Sumbawa diperlukan untuk pemaknaan atas jati diri kebudayaan lokal melalui sejarah yang dipraktikkan atau segala aspek yang telah ada sebelumnya (ibid: 166). Menurut banyak catatan sejarah, Sumbawa sudah hidup dalam konteks keanekaragaman sejak dahulu kala. Hal ini disebabkan oleh letak Pulau Sumbawa yang merupakan jalur perdagangan saat itu. Orang pertama yang memikirkan perlunya untuk menjaga ciri khas orang Sumbawa atau *tau samawa* dan konteks

kehidupan masyarakat Sumbawa yang beranekaragam adalah Sultan Muhammad Kaharuddin III, pada periode tahun 1931-1958 (Fisabilillah, 2018: 11-13). Ia kemudian menjaga, meneruskan, dan melestarikan pola penerimaan dan keterbukaan *tau samawa* sebagai sebuah ciri khas Sumbawa waktu itu.

Pada tahun 2019 saya mendapati keterangan tentang upaya memodernisasi etika moralitas *sabalong samalewa* melalui laman webiste resmi pemerintah Sumbawa besar. Pada laman tersebut (<https://www.sumbawakab.go.id>) ditemui keterangan bahwa *sabalong samalewa* muncul kembali sebagai sebuah bentuk kristalisasi dari konsep kehidupan tersebut pada periode tahun 1989-1994, di masa kepemimpinan bupati H. Yakub Koeswara. *Sabalong samalewa* kemudian diterjemahkan ulang sebagai; membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik material dengan pembangunan mental spiritual (dunia dan akhirat). Saya mencoba menelusuri sejarah pencatatan tentang rekonstruksi etika moralitas '*sabalong samalewa*' ini melalui wawancara langsung dengan bapak H. Yakub Koeswara sebagai pelaku sejarah di kediamannya pada tanggal 20 Desember 2019. Ia mengatakan bahwa:

"Sabalong samalewa disematkan untuk tau samawa bukan tanpa dasar, melainkan karena pemimpin (bupati) saat itu melihat semangat bekerjasama dan keterbukaan yang luar biasa dari tau samawa."

Bapak H. Yakub Koeswara menegaskan bahwa upaya pengejawantahan semacam itu

kemudian dibuktikan dengan prestasi melalui berbagai penghargaan yang didapatkan Sumbawa, seperti: piala Adipura dan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha pada tahun kepemimpinannya di masa Orde Baru. Menurutnya, dalam pengertian itu, *tau samawa* diharuskan untuk peduli terhadap apapun, saling bahu-membahu, dan saling mengingatkan agar misi pembangunan hidup di dunia diperoleh oleh semua orang. Secara umum, masyarakat Sumbawa moderen sering menerjemahkan *sabalong samalewa* sebagai semangat bekerjasama dan saling tolong menolong. Hal tersebut dilakukan karena menurut masyarakat setempat semangat bekerjasama merupakan sifat asli leluhur *tau samawa* dari zaman dahulu kala.

Menurut hasil penelusuran Fisabilillah (2017) makna dari *sabalong samalewa* kemudian dimanifestasikan ke dalam slogan 3ST atau saleng tulung (saling tolong), saleng tulang (saling lihat), dan saleng totang (saling mengingatkan). Perilaku-perilaku tersebut yang nantinya akan menjadi kesatuan yang kuat dalam menjaga rasa kekeluargaan seluruh masyarakat Sumbawa. Sementara, menurut Zulkarnaen (2011) upaya mengejawantahkan slogan-slogan kecil tersebut dilakukan dengan identifikasi sepuluh prinsip moral dalam menerapkan sebuah keseimbangan dalam *sabalong samalewa*, yaitu:

1. *Saleng-pediq*, yaitu rasa empati terhadap penderitaan orang lain, karena orang lain itu dianggap sebagai bagian dari dirinya sendiri.

2. *Saleng-sayang*, tumbuh dari sikap saleng pediq, karena merupakan manifestasi kasi saying antarsesama dalam lingkungannya.

3. *Saleng-saduq*, muncul setelah mereka saling mempercayai satu-sama lainnya, bersumber dari rasa percaya diri masing-masing individu, sebagai bentuk kejujuran.

4. *Saleng-sakikiq*, adalah kemampuan saling berbagi rasa dalam suka maupun duka, melarat maupun makmur bersama-sama menapaki dan melayari kehidupan dalam segala suasana.

5. *Saleng-tulong*, merupakan sewajiban setiap insane untuk saling membantu dalam berbagai masalah, dan umum kita sebagai sifat kegotongroyongan dalam masyarakat.

6. *Saleng-satingi*, muncul karena rasa hormat kepada orang lain. Siapa yang menghormati orang lain, maka ia akan menjadi lebih terhormat, dan siapa yang merendahkan orang lain, maka ia akan menjadi lebih hina.

7. *Saleng-jango*, adalah sikap kekeluargaan yang dipupuk melalui saling mengunjungi bersilaturahmi dengan orang lain.

8. *Saleng-satotang*, sebagai wujud saling mengingatkan kepada kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

9. *Saleng-beme*, yaitu saling bombing meningkatkan dan mengembangkan potensi masing-masing kearah kebaikan bersama.

10. *Saleng-santurit* adalah se-iyu atau se-kata menuju kepada kemajuan dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesepuluh prinsip moral inilah yang menjadi penopang pembangunan fisik atau dunia di tana Sumbawa. Dalam perkembangannya saat ini, sepuluh poin diatas kemudian dipadatkan menjadi tiga poin penting yang dikenal dengan 3ST. makna 3ST sendiri memiliki arti saling tulong (saling tolong), saling tulang (saling lihat), dan saling totang (saling mengingatkan). Dengan demikian maka slogan 3ST merupakan bentuk pemadatan dan penyederhanaan dari kesepuluh prinsip moral yang terkandung dalam *sabalong samalewa* agar mudah diingat oleh *tau samawa* (warga atau masyarakat di Pulau Sumbawa).

Berbicara mengenai penggunaan teori universal untuk menyelesaikan permasalahan lokal suatu daerah merupakan sesuatu yang baru dibicarakan saat ini. Kesadaran akan pentingnya memperhitungkan kondisi ideal di masyarakat menjadi dasar utama pentingnya merumuskan teori sesuai dengan konteks lokus yang digunakan. Michael D. Jackson (2016) dalam bukunya yang berjudul *As Wide As the World Is Wise*, menganjurkan setiap penelitian antropologi dan filosofis sudah harus mulai menggunakan sebuah pendekatan lokal sesuai dengan lokus dimana riset tersebut dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena setiap daerah dan komunitas memiliki kecenderungan adat, tradisi, dan pola kehidupan yang berbeda-beda. Dalam cara berfikir demikian, sudah seharusnya penulis memasukkan *sabalong samalewa* sebagai sebuah tradisi dan cara

hidup asli orang-orang yang hidup di daerah Sumbawa atau yang biasa disebut dengan istilah *tau samawa*.

Mengacu pada data yang telah saya kumpulkan maka, *sabalong samalewa* merupakan bentuk kriticalisasi atau pepadatan menjadi sebuah konsep utuh dari sifat asli *tau samawa* yang telah dibentuk dan diwariskan secara turun temurun. Menurut saya, prinsip moralitas turunan dari *sabalong samalewa* bukan semata merupajan slogan, melainkan suatu nilai lokal yang dapat diterjemahkan ulang sebagai kerangka pembangunan masyarakat yang mengutamakan keseimbangan. Perkembangan sejarah dan konteks sosial masyarakat di Pulau Sumbawa yang beragam menjadi pondasi penting di dalam menekankan pola-gotong royong dalam mengatasi konflik sosial. Secara historis, perjumpaan budaya di pulau Sumbawa tidak terlepas dari segala bentuk konflik dan bahkan pertikaian (perang), meski demikian perjumpaan itu tidak meniadakan keberadaan “liyan” atau relasi dengan “yang lain” antara masyarakat asli di pulau Sumbawa (*tau samawa*) sejak dahulu sampai saat ini. Dengan kata lain *sabalong samalewa* dapat dimaknai sebagai nilai filosofis sekaligus praktik pengetahuan lokal yang dapat mempertemukan perbedaan identitas dari keragaman masyarakat yang mendiami pulau Sumbawa kini.

Dalam perkembangannya *sabalong samalewa* kemudian menjadi kritik dan tandingan masyarakat Sumbawa untuk pola hidup yang individualis dan saling menjatuhkan hanya karena urusan

keperbedaan yang lazim dalam suatu komunitas. Relativitas logis antara keyakinan yang dipegang dan tindakan sebagai seorang manusia mendorong masyarakat Sumbawa waktu itu harus merumuskan sebuah pola hidup yang mengacu pada moral kehidupan yang terbuka melihat orang lain disekitar mereka. Pada tahap inilah justru orang lain akan menemukan wajah asli *tau samawa* yang transformatif berangkat dari budaya lokal mereka sendiri. Dikemudian hari etika moral *sabalong samalewa* dapat dijadikan sebagai sebuah alat keramatomahan oleh masyarakat Sumbawa. Sebuah proses kehidupan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat akan berkembang menjadi sebuah ingatan kolektif yang harus dilakukan dikemudian hari.

Disamping itu, alat dalam pengertian ini merupakan frasa atau konsepsi kelengkapan yang digunakan seseorang untuk menghadapi kompleksitas kehidupan dan sebagai representasi konsep budaya lokal yang sedang di hidupi. Dalam tahap ini konsep *sabalong samalewa* menjadi sebuah bentuk pandang dan etika yang mengatur kehidupan pribadi dan perjumpaan dengan orang lain. Terlebih lagi karena konsep tersebut lahir dari keadaan lokal masyarakat Sumbawa, dengan begitu dapat menjadi sebuah alat atau perangkat (*tools*) yang relevan dalam menuntun moral dan akal sehat *tau samawa*.

Perkembangan yang saat ini berlangsung adalah munculnya keresahan karena banyak warga masyarakat di Sumbawa yang mulai melupakan etika moralitas *sabalong samalewa*. Fakta ini kemudian

diperparah oleh banyaknya pendatang yang bekerja, berdagang, ataupun bersekolah di Sumbawa tetapi kemungkinan besar tidak mengetahui etika *sabalong samalewa*. Di sinilah letak persoalannya, ketidaktahuan sejarah dan perbedaan identitas tidak boleh menjadi sebuah alat perpecahan. Tetapi perbedaan identitas dapat menolong orang Sumbawa mencapai cita-cita dengan berbagai sudut pandang positifnya masing-masing serta menghadirkan aspek keadilan dan kesejateraan bagi seluruh elemen masyarakat. Disamping itu, penguatan akan pengetahuan lokal seperti etika moralitas *sabalong samalewa* harus menjadi sesuatu digalakkan kembali agar seluruh masyarakat mengetahui dasar dan pegangan hidup di Sumbawa. Agar *tau samawa* (masyarakat asli) dapat dengan tegas menolak berbagai macam bentuk dampak negatif dari perbedaan identitas tersebut. Dengan begitu, barulah visi berdasarkan moralitas moderen dan cita-cita daerah Sumbawa menjadi relevan.

Memang dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal semacam itu sebetulnya akan menjadi tantangan baru bagi para penganut agama-agama maupun identitas-identitas lain untuk melihat entitas nilai lokal yang menyejarah di Sumbawa sebagai patron kegiatan kehidupan. Memang dalam kenyataannya kini didapati fakta untuk menjadikan Sumbawa sebagai salah satu wilayah bagi perluasan Islamisasi secara moderen (Suwondo dkk, 1978: 37). Tetapi hal itu bukan menjadi penghalang bagi kemajuan kehidupan multikultural dan praktik budaya yang plural dan telah eksis di Sumbawa berkat etika moral *sabalong samalewa* yang tetap menjadi

pegangan hidup khususnya bagi *tau samawa*. Kehadiran setiap agama seperti Islam, Hindu, Kristen, dan agama lainnya di Sumbawa bukan hanya sebagai wujud kesetiaan terhadap agama masing-masing, tetapi harus dijadikan sebagai bagian dari pengalaman iman untuk menjaga Sumbawa tetap adil dan menyejahterakan semua orang di dalamnya. Kepentingan pribadi atau satu identitas tertentu harus dapat diatasi dengan sebuah kepentingan kolektif atau bersama yang sifatnya positif.

Dengan kata lain, yang seharusnya terjadi adalah pengembalian pola pikir dengan konsep lokal yang sebenarnya sudah ada di Sumbawa. Kehidupan yang ideal bagi seluruh masyarakat Sumbawa bukan hanya mimpi yang belum tercapai, tetapi harus menjadi sebuah proses yang harus di jalani satu demi satu. Proses harus segera dilakukan agar kebebasan dan kemerdekaan hidup setiap manusia tidak hanya menjadi sebuah mitos semata. Tujuan akhir yang seharusnya dicapai bukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi sebuah pola kehidupan yang memanusiakan manusia lain dan hal ini sebenarnya sudah dirumuskan oleh nenek moyang *tau samawa*. Seluruh bagian di dalam komunitas budaya yang disebut *tau samawa*, mau tidak mau terlibat dan turut bertanggungjawab, baik dalam pembuatan sejarah Sumbawa maupun dalam tulisan sejarahnya di kemudian hari. Hal ini yang kemudian menyebabkan cara suatu bangsa menghadapi kenyataan atau realitas sosial hari ini, diangkat dalam perspektif masa lampau, yang kemudian ditransformasi ke dalam bingkai masa depan. Bercermin dari rumusan tersebut, *sabalong samalewa* menjadi sebuah identitas

perdamaian yang sangat dekat, bersahabat dan mudah untuk dipahami oleh konteks permasalahan di tana Sumbawa.

Kecendrungan gerakan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini sangat tidak menentu dan mudah ditunggangi oleh kekuasaan atau kepentingan dibelakangnya. Fakta tersebut kemudian diperparah oleh cara penanganan atau resolusi konflik yang ditawarkan oleh pemerintah yang sifatnya elitis. Masyarakat kalangan bawah yang merasakan konflik terkadang tidak mengetahui langkah apa yang sudah diambil pemerintah untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Lagi-lagi penegasan konsep yang mudah didapatkan ditengah-tengah masyarakat menjadi sebuah pergumulan yang hingga saat ini susah untuk dilakukan. Dikatakan susah bukan karena masyarakat tidak memiliki sebuah konsep rekonsiliasi konflik, tetapi karena model yang ditawarkan pemerintah terkadang tidak dimengerti dan hanya mengambang dalam realisasinya. Soedjatmoko (1995) dalam bukunya yang berjudul "Dimensi Manusia dalam Pembangunan", mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kesadaran kolektif positif yang hanya bisa diungkapkan dalam interaksi-interaksi dirinya dengan realitas sosial. Melalui penegasan ini, bisa dikatakan bahwa *tau samawa* harus menjadikan *sabalong samalewa* sebagai dasar dan pegangan hidup agar dapat menjadi contoh bagi kehidupan beragam di Indonesia.

Etika moral *sabalong samalewa* juga tercermin dari semua orang yang tinggal di tana Sumbawa yang

sudah mulai gelisah dengan ilusi-ilusi mengenai harapan dan aspirasi, karena perubahan yang memburuk di dalam keadaan sosial di tengah masyarakat. Kesadaran kolektif positif yang sudah mulai berkembang di masyarakat Sumbawa secara umum harus segera di rubah menjadi sebuah aksi atau gerakan sosial. Termasuk di dalamnya juga gerakan keagamaan di Sumbawa. Ia seharusnya bukan sekedar menjadi gerakan yang membela sesuatu yang abstrak, melainkan membela kepentingan orang banyak yang bersentuhan secara langsung dengan logika kapitalis yang menindas.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *tau samawa* seharusnya sudah mulai berfikir secara baru karena setiap orang yang tinggal di Sumbawa memiliki modal, tujuan, dan musuh bersama. Pada titik inilah keseimbangan yang dimaksudkan dalam etika *sabalong samalewa* dapat dicapai. Karena pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah memanusiakan orang lain, sehingga dalam penerapan etika moralitas ini dibutuhkan sebuah dorongan batin personal dan tanpa pemaksaan dari orang lain. Perjumpaan dengan orang lain harus dimaknai sebagai sebuah pola kehidupan mutual yang memang sudah ada sejak dulu di tana Sumbawa. Sudah saatnya hubungan dengan orang lain yang tercermin dalam interaksi keseharian *tau samawa* dijadikan sebuah komitmen bersama untuk sebuah kemajuan bersama.

Memang harus diakui bahwa etika moralitas *sabalong samalewa* juga tidak bisa dikatakan sempurna karena tidak banyak berbicara perkembangan masalah yang terjadi ditengah-tengah

tau samawa saat ini. Terlebih lagi berpatokan pada hukum budaya animisme yang oleh sebagian golongan agama dianggap merupakan sebuah bentuk penyembahan berhala dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui bahwa permasalahan etis seperti itu harus diupayakan melalui sebuah keterbukaan untuk mengkonsepkan ulang pola beragama agar lebih inklusif-transformatif tanpa bermaksud untuk mengganggu dogma masing-masing agama. Dengan kata lain, bagaimana menyusun suatu pola relasi ko-eksistensi agar masing-masing agama tersebut hidup dalam konteks yang sama dengan permasalahan sosial dan etis yang sama. Peristiwa semacam konflik sosial yang terus menghantui kedamaian di pulau Sumbawa telah mendorong upaya untuk menafsirkan ulang etika moralitas *sabalong samalewa* sebagai pilihan logis untuk kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat.

Penyelenggaraan hidup yang logis dan bijaksana dapat dilakukan khususnya oleh *tau samawa* (warga asli) jika mau menyeimbangkan realitas antara pembangunan dan etika *sabalong samalewa* sebagai pegangan moral khususnya dalam mengatasi kesenjangan sosial dan perubahan lingkungan sebagai dampak negatif dari pembangunan fisik yang mengabaikan nilai dan praktik budaya lokal yang menyejarah.

E. Kesimpulan

Ketika sejarah dan etnografi sosial harus menggambarkan bagaimana wajah asli orang dan pulau Sumbawa, maka memang seringkali dihadapkan pada konteks sosial budaya yang bersifat dilematis. Pola hidup suku atau orang asli di pulau Sumbawa (*tau samawa*) yang sangat terbuka memang menjadi salah satu penyebab bagi arus migrasi beragam kelompok-kelompok sosial dan identitas budaya untuk tinggal dan menetap di pulau Sumbawa. Di sisi lain, tergerusnya identitas budaya masyarakat adat atau warga asli juga dapat berdampak pada penguatan dan dominasi budaya oleh para pendatang sehingga dapat dipolitisasi menjadi sebuah konflik sehingga dapat merusak wajah pulau Sumbawa yang inklusif tersebut. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk menelusuri, mentafsirkan ulang dan mengidentifikasi nilai dan praktik etika etika moralitas *sabalong samalewa* khususnya sebagai dasar pijakan bagi relasi lintas agama (iman) dan lintas budaya di tana Sumbawa.

Rekonstruksi atas etika moral *sabalong samalewa* melalui pendekatan keseharian dan praktik budaya sehari-hari dapat menjadi sebuah ikatan yang kuat untuk meredam terjadinya sebuah konflik ditengah-tengah masyarakat. Pendekatan semacam ini pula yang kemudian memungkinkan terjalannya relasi lintas agama (iman) dan etnis melampaui ruang-ruang fisik dalam pertemuan formal. Pengejawantahan etika moral melalui tanda simbolik juga memberikan ruang baru bagi imajinasi sosial dan akan berlanjut pada terbangunnya memori kolektif

atau ingatan bersama yang dapat mengantisipasi konflik. Sesungguhnya, pola hidup damai, mengutamakan musyawarah, keterbukaan, adalah wajah asli budaya di pulau Sumbawa yang inklusif. Hal inilah yang membuat kehidupan di tana Sumbawa bisa hidup rukun sampai saat ini. Disamping itu, Sumbawa memiliki keseimbangan yang luar biasa jika dapat meletakkan kebudayaan asli Sumbawa dengan pembangunan secara seimbang. Tidak menutup kemungkinan Sumbawa akan menjadi sebuah daerah percontohan yang akan menarik banyak kalangan peminat dan pengkaji budaya untuk belajar mengenai mekanisme tersebut.

Etika *sabalong samalewa* juga dapat menjadi suatu contoh bagaimana prinsip moralitas secara lokal dipraktikkan sekaligus dengan mempertimbangkan keseimbangan alam secara ekologis dan juga aspek kesadaran atas struktur sosial dan dampak lanjutannya di semua lapisan masyarakat. Praktik itu melibatkan tidak hanya dari kalangan atas (elitis) tetapi juga dari masyarakat bawah (akar rumput). Dalam konteks inilah peran pemerintah juga para pemangku elit budaya seperti Sultan Sumbawa yang selama ini berposisi sebagai patron sosial dapat turut serta memfasilitasi segala mekanisme proses pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman identitas dan budaya di pulau Sumbawa. Manifestasi *sabalong samalewa* juga mencerminkan sebuah hubungan mutualisme di dalam masyarakat yang memungkinkan terbentuknya suatu kesadaran untuk kehidupan bersama yang seimbang. Keseimbangan dalam kehidupan baik secara individual maupun secara sosial seperti

ketenangan, pegangan yang jelas, dan kesatuan seluruh manusia yang hidup di tana Sumbawa akan dapat tercapai ketika etika moral *sabalong samalewa* dapat dipraktikkan dengan sungguh-sungguh di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2013. Etika. Yogyakarta: PT Kanisius,
- Brownlee, Malcolm. 2016. Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di Dalamnya. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Connolly, Peter. 2001. Approaches to the Study of Religion. New York: Continuum.
- Fisabilillah, Ridho. 2017. Menghimpun yang Terserak: Esai-esai Sejarah Lokal Sumbawa. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Fisabilillah, Ridho. 2018. Pemimpin yang Tidak Melawan Arus: Sejarah Pemikiran Sultan Kaharuddin III. Sumbawa: Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- Halim, Abd. 2014. Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2B.
- Hall, Douglas J. 2004. The steward: A Biblical Symbol Come of Age. New York: Wipf and Stock Publishers.
- Harari, Yuval Noah. 2018. Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Huntington, Samuel P. 1993. "The Clash of Civilization?", dalam *Foreign Affairs*, Edisi musim panas.
- Iskandar, Syaifuddin. 2019. "Resolusi Konflik Etnik Samawa dan Etnik Bali di Sumbawa", *Jurnal POPULASI*, Vol. 19 (1).
- Jackson, Michael D. 2016. *As Wide As The World Is Wise*. Columbia: Columbia University Press.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kung, Hans. 1997. *Global Ethos for World Politics and World Economy*. Munchen.
- Levinas, Emmanuel. 1982. *Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo*, terj. Richard A. Cohen. Pittsburgh: Duquesne University Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mustansyir, Rizal. 2007. *Filsafat Analitik: Sejarah, Perkembangan, dan Para Tokohnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Noorduyn, J. 2007. *Sejarah Sumbawa*. Yogyakarta: Percetakan Arti Bumi Intaran Mangkuyudan.
- Rudyansjah, Tony. 2012. *Antropologi Agama: Wacanawacana Mutakhir dalam Kajian Religi dan Budaya*. Jakarta: UI Press.
- Sjamsuddin, Helius. 2012. *Letusan Gunung Tambora 1815*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sjamsuddin, Helius. 2013. *Memori Pulau Sumbawa: Tentang Sejarah, Interaksi Budaya, dan Perubahan Sosial Politik di Pulau Sumbawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soedjatmoko. 1993. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Suwondo, Bambang, dkk. 1978. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tjaya, Thomas Hidya. 2012. *Enigma Wajah Orang Lain Menggali Pemikiran Emmanuel Levinas*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wickeri, Philip L 2000. *Plurality, Power, and Mission. Intercultural Theological Exploration on the Role of Religion in the New Millenium*. London: The Council for World Mission.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society. Volume 1, An Outline of Interpretative Sociology*, (Trans. Guenter Roth and Claus Eittich). California: The Regent of University of California.
- Weber, Max, Henderson, A.M., Parsons, Talcott. 1947. *The Theory of Social and Aconomic Organization*. New York: The Free Press.
- Zollinger, H. 1855. *Besteigung des Vulkanes Tambora auf der insel Sumbwa und Schilderung der*

Erupzion desselben im Jahr 1815. Universitaet
Bern.

Van Padang M. Neumann. 1951. "Catalogue of the
Active Volcanoes of the World Including
Solfatara Fields", dalam the Active Volcanoes
of Indonesia, part I. The Hague.

Zulkarnain, Aries. 2011. Kepemimpinan dalam Adat
dan Rappang Tana samawa. Yogyakarta:
Penerbit Ombak.

Sumber online

Website / Laman resmi pemerintah Sumbawa Besar.
(<https://www.sumbawakab.go.id/lambang-dan-artu.html>) Diakses 12 Juni 2019, pk. 20.00
WITA

Website/ Laman resmi pemerintah Sumbawa Besar.
(<https://www.sumbawakab.go.id/lambang-dan-arti.html>.) Diakses 12 Juni 2019, pk. 20.30
WITA